

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Skenario dan asumsi pembangunan daerah tahun 2016 – 2021 berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025, hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sampai dengan saat ini, dan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2021.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan tolok ukur pembangunan daerah yang harus dicapai pada setiap tahapan pembangunan jangka menengah. Dalam hal perubahan indikator kinerja daerah, dilakukan penyesuaian dengan mengacu kepada :

1. Sasaran Pembangunan Kabupaten Barru berdasarkan RPJMN 2014-2019; meliputi indikator pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan angka pendapatan per kapita;
2. Penyelarasan IPM berdasarkan capaian kurun waktu tahun 2010 s.d. 2015, untuk proyeksi 2016 - 2021.

Tabel 9.1

Perkembangan IPM dan Komponennya di Kabupaten Barru
Tahun 2011 - 2015

INDIKATOR	2011	2012	2013	2014	2015
1. Angka Harapan Hidup	67,52	67,61	67,69	67,73	67,74
2 Rata-rata Lama Sekolah	7,08	7,11	7,13	7,28	7,31
3. Daya Beli (Ribu Rp.)	9,325	9,501	9,655	9,733	9,898
4. Indeks Kesehatan	73,11	73,25	73,37	73,44	73,57
5. Indeks Pendidikan	57,12	57,42	59,41	61,62	61,73
6. Indeks Daya Beli	68,00	68,57	69,06	69,31	69,31
7. IPM	65,73	66,07	67,02	67,94	67,99

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru, 2015

Pertumbuhan IPM di Kabupaten Barru menunjukkan trend yang meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai angka 5,8 % di tahun 2015. Komponen pembangun laju pertumbuhan ekonomi nasional perlu mendapat perhatian karena memiliki pengaruh terhadap iklim investasi dalam negeri sehingga kemungkinan yang lebih besar mengimbas pada pertumbuhan iklim usaha, investasi dan serapan tenaga kerja.

Dengan asumsi pencapaian pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran dan peningkatan pendapatan per kapita yang dalam implementasinya sangat tergantung kepada kebijakan nasional, menyangkut kebijakan fiskal maupun moneter serta investasi, maka penetapan angka indikator turunan IPM harus mengakomodasikan target RPJM Nasional dan RPJM Propinsi selaku wakil pemerintah pusat di daerah.

Pertimbangan aspek-aspek regional dan permasalahan keotonomian layak dikemukakan sebagai materi bahasan dalam upaya pencapaian optimum IPM. Meskipun demikian, mengingat kemampuan realisasi pencapaian target indikator turunan IPM sangat dipengaruhi kemampuan fiskal daerah dan program pembangunan yang berorientasi IPM, serta ketersediaan ruang fiskal daerah, dengan demikian indikator

turunan IPM ditetapkan dengan kisaran skala antara target RPJMN dan target berdasarkan rekomendasi BPS yang mempertimbangkan aspek-aspek tersebut di atas.

Penguatan peran pemerintah daerah dalam menyusun tata kelola pemerintahan di lingkup daerahnya adalah salah satu pemetaan potensi dan pendalaman peran (*role position*) pemerintahan daerah sebagai pihak yang memiliki nilai strategis dalam menjalankan pembangunan manusia. Otonomi daerah adalah sebuah konsep besar yang memberikan ruang inovasi bagi daerah otonom (Kabupaten/Kota) untuk mengenali, menggali dan memberikan ciri unik pada potensi daerah nya masing-masing. Bertitik tolak dari peran dasar pemerintah daerah tersebut, maka perlu dirumuskan langkah-langkah strategis yang mampu mengusung isu isu sentral daerah kedalam sebuah langkah kebijakan daerah.

Isu isu sentral sektoral yang diusung instansi pusat harus mampu diterjemahkan secara menyeluruh dengan tidak meninggalkan isu isu lokal. Sebagai sebuah daerah otonom, Kabupaten Barru diwajibkan menetapkan target-target capaian dari indikator-indikator yang disepakati bersama antara pemerintah kota dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Barru. Target pencapaian ini adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik.

Target capaian indikator kinerja daerah yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 9.2

Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Diakhir periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	Pertumbuhan PDRB	6,32	8,65	8,70	8,18	7,23	6,90	6,45
1.2.	PDRB per kapita (Rp.)	28,725,930	31,209,661	33,924,827	36,699,933	39,355,159	42,070,324	44,785,490
1.3.	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	9.37	8.99	8.62	8.24	7.87	7.49	7.49
1.4.	Angka kriminalitas yang tertangani	8.99	8.73	8.39	8.12	7.86	7.66	7.66
Fokus Kesejahteraan Masyarakat								
1.	Pendidikan							
1.1.	Angka melek huruf	96,56	96,60	96,70	96,80	96,90	96,70	96,70
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah	7,31	7,34	7,37	7,40	7,43	7,46	7,49
1.3.	Angka partisipasi kasar							
1.3.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)	107,04	106,5	106	105	104	103	103

1.3.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)	105,98	105	104	103	102	101	101
1.3.3	Angka Partisipasi Kasar (APK)) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	85,30	86	86,5	87	87,5	88	88
1.4.	Angka pendidikan yang ditamatkan							
1.4.1	Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A	2.21	2.19	2.03	2.10	2.04	2.02	2.02
1.4.2	Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B	1.88	2.01	2.03	2.08	2.12	1.99	1.99
1.4.3	Angka pendidikan yang ditamatkan SMU/SMK/MA/Paket C	1.40	1.64	1.67	1.71	1.85	1.88	1.88
1.5.	Angka Partisipasi Murni							
1.5.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	95,70	93,00	93,50	94,00	94,50	95,00	95,00
1.5.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	87,19	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00	93,00
1.5.3.	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	60,73	62,00	63,50	65,00	66,50	68,00	68,00
2.	Kesehatan							
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi	99,80	99,80	99,80	99,80	99,80	99,80	99,80
2.2.	Angka usia harapan hidup	67,74	67,79	67,83	67,88	67,92	67,97	68,01
2.3.	Persentase balita gizi buruk	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05
3	Ketenagakerjaan							

3.1	Rasio penduduk yang bekerja	1:0,99	1:0,82	1:1,00	1:1,01	1:1,02	1:1,03	1:1,04
Fokus Seni Budaya dan Olahraga								
1.	Kebudayaan							
1.1.	Jumlah grup kesenian	19	1	1	1	1	1	1
1.2.	Jumlah gedung	1	1	1	1	1	1	1
2.	Pemuda dan Olahraga							
2.1.	Jumlah klub olahraga	81	81	81	81	81	81	81
2.2.	Jumlah gedung olahraga	8	1	1	1	1	1	1
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Fokus Layanan Urusan Wajib								
1.	Pendidikan							
1.1.	Pendidikan dasar :							
	Angka partisipasi sekolah	95,70	95,58	95,47	95,35	95,23	95,11	95,00
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	94,47	91,38	91,00	90,62	90,24	89,86	89,48

	Rasio guru/murid	735,04	758,51	781,98	805,45	828,92	852,39	875,83
	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	0,038	0,039	0,040	0,041	0,042	0,043	0,046
1.2.	Pendidikan menengah:							
	Angka partisipasi sekolah	87, 19	88,38	89,56	90,75	91,93	93,12	94,30
	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	91,76	91,30	90,85	90,39	89,93	89,48	89,48
	Rasio guru terhadap murid	522,32	759,42	759,42	759,42	759,42	759,42	759,42
	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata	0,038	0,040	0,041	0,042	0,044	0,045	0,045
	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	96,56	96,60	96,70	96,80	96,90	97,00	97,00
1.3.	Fasilitas Pendidikan:							
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	91,56	92.56	93.06	93.76	94.36	95.36	95.36
	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	96,25	96.45	96.85	97.2	97.5	97.9	97.9
1.4.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):							
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	70,77	73,00	75,00	77,00	79,00	81,00	81,00
1.5.	Angka Putus Sekolah:							

	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,12	0.116	0.112	0.11	0.105	0.1	0.1
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,41	0.4	0.38	0.36	0.33	0.3	0.3
	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0.25	0.23	0.22	0.2	0.18	0.16	0.16
1.6.	AngkaKelulusan:							
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100	100	100
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100	100	100	100
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100	100	100	100	100	100	100
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	98.06	98.5	98.85	99.3	99.6	100	100
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	93.15	93.5	93.8	94	94.3	94.7	94.7
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	91,69	92.8	94	95.1	96	97.5	97.5
2	Kesehatan							
2.1.	Rasio posyandu per satuan balita	18,89	19,09	19,29	19,49	19,69	19,89	20,00
2.2.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
2.3.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,006	0,006	0,006	0,006	0.011	0,011	0,011

2.4.	Rasio dokter per satuan penduduk	0,17	0,194	0,218	0,242	0,266	0,288	0,288
2.5.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,34	0,372	0,404	0,436	0,468	0,5	0,5
2.6.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	63,03	69	71	73	75	78	80,00
2.7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	91,34	95	96	97	98	99	100
2.8.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	98,18	86	88	90	92	93	100
2.9.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	100
2.10.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	69,10	71,28	73,46	75,64	77,82	80	80
2.11.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	100	100
2.12.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	78,24	79,19	80,14	81,09	82,04	83,00	83,00
2.13.	Cakupan kunjungan bayi	100	100	100	100	100	100	100
2.14.	Cakupan puskesmas	171,41	171,41	171,41	171,41	171,41	171,41	171,41
2.15.	Cakupan pembantu puskesmas	60	60	60	60	60	60	60
3	Pekerjaan Umum							

3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	62,99	67,96	70,89	73.81	76,74	79,66	82,59
3.2.	Rasio Jaringan Irigasi	157,287 km	9,412 km	37,60 km	36,25 km	37,25 km	20,00 km	240,399 km
3.3.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	1 : 655	1 : 655	1 : 655	1 : 655	1 : 655	1 : 655	1 : 655
3.4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	65.846	68.346	70.846	73.346	75.846	78.346	80.846
3.5.	Rasio rumah layak huni	66.72	66.97	67.22	67.47	67.72	67.97	68.22
3.6.	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	39,445.78	39,445.78	39,445.78	39,445.78	39,445.78	39,445.78	39,445.78
3.7.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	4,532	4,556	4,580	4,604	4,628	4,652	4,676
3.8.	Lingkungan Pemukiman							
4.	Perumahan							
4.1.	Rumah tangga pengguna air bersih	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
4.2.	Rumah tangga pengguna listrik	35872	37072	38272	39472	40672	41872	43072
4.3.	Rumah tangga ber-Sanitasi	65.846	71.096	76.516	82.126	87.626	93.176	98.776
4.4.	Lingkungan pemukiman kumuh	0.264	0.264	0.264	0.264	0.664	0.664	0.864

4.5.	Rumah layak huni	66.72	66.75	66.79	66.82	66.85	66.89	66.92
5	Perencanaan Pembangunan							
5.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	101,23	100	100	100	100	100	100
6	Perhubungan							
6.1	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	jumlah pelabuhan laut =5, terminal =5	jumlah pelabuhan laut =5, terminal =5	jumlah pelabuhan laut =5, terminal =6	jumlah pelabuhan laut =5, terminal =6	jumlah pelabuhan laut =5, terminal =7	jumlah pelabuhan laut =5, terminal =8	
6.2	Pemasangan Rambu-rambu		rambu lalu lintas 14,7 km (88 unit), marka jalan 11,09 km, pagar pengaman jalan =0,763 km (763 m), Zona selamat sekolah =2 lokasi	rambu lalu lintas 21 km (126 unit), marka jalan 18 km, pagar pengaman jalan =0,714 km (714 m)	rambu lalu lintas 21 km (126 unit), marka jalan 21 km, pagar pengaman jalan =0,714 km (714 m), zona selamat sekolah = 3 lokasi	rambu lalu lintas 28 km (168 unit), marka jalan 24,5 km, pagar pengaman jalan =0,714 km (714 m)	rambu lalu lintas 32 km (192 unit), marka jalan 25,5 km, pagar pengaman jalan =0,714 km (714 m)	
7	Lingkungan Hidup							
7.1	Persentase penanganan sampah	40.88	44.18	47.48	50.78	54.08	57.38	60.68

7.2	Persentase Penduduk berakses air minum	84	86,82	89,64	92,46	95,28	98,10	99,20
7.3	Persentase Luas pemukiman yang tertata							
7.4	Pencemaran status mutu air	6	-	3	3	3	3	3
7.5	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	-	-	60	60	60	60	-
7.6	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	100	100	100	100	100	100	100
7.7	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0.21	0.25	0.29	0.33	0.37	0.41	0.45
7.8	Penegakan hukum lingkungan	100	-	100	100	100	100	100
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
8.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	58.11	58.34	58.57	58.8	59.03	59.26	59.26
8.2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	3.29	4.43	3.57	3.71	3.85	3.99	3.99
8.3	Rasio KDRT	0.042	0.046	0.05	0.054	0.058	0.062	0.062
8.4	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0	0	0	0	0	0	0
8.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	19.65	21.36	23.07	24.78	26.49	28.2	28.2
8.6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100	100	100	100	100	100	100

9	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							
9.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1.4	1.57	1.74	1.91	2.08	2.25	2.25
9.2	Rasio akseptor KB	71.55	73.13	74.71	76.29	77.87	79.45	79.45
9.3	Cakupan peserta KB aktif	0.72	0.74	0.76	0.77	0.79	0.81	0.81
9.4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	30.59	30.28	29.97	29.66	29.35	29.04	29.04
10.	Kependudukan dan Catatan Sipil							
10.1.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	1 : 1,12	1 : 1,13	1 : 1,14	1 : 1,15	1 : 1,17	1 : 1,19	1 : 1,19
10.2.	Rasio pasangan berakte nikah	100	100	100	100	100	100	100
10.3.	Kepemilikan KTP	89.36%	88.73%	87.86%	86.78%	85.51%	84.08%	84.08%
10.4.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	26.25%	28.53%	30.76%	32.97%	35.19%	37.40%	37.40%
10.5.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
10.6.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
11	Sosial							
11.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	6	6	6	7	7	7	7

11.2	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	7.34%	8.22%	8.96%	9.84%	10.91%	12.25%	12.25%
11.3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	18.45%	6.31%	6.31%	6.31%	6.31%	6.31%	50%
12	Ketenagakerjaan							
12.1	Angka partisipasi angkatan kerja	46.97%	44.20%	41.60%	39.15%	36.85%	34.68%	34.68%
12.2	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	1.46	0	0	0	0	0	0
12.3	Tingkat partisipasi angkatan kerja	47.42%	43.96%	40.74%	37.77%	35.01%	32.45%	32.45%
12.4	Pencari kerja yang ditempatkan	16.33%	21.65%	28.09%	36.50%	47.17%	60.98%	60.98%
12.5	Tingkat pengangguran terbuka	7.68	7.32	7.21	7.03	6.95	6.82	6.82
12.6	Keselamatan dan perlindungan	14.60%	20.44%	24.09%	27.74%	31.39%	35.04%	35.04%
12.7	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	0	0	0	0	0	0	0
13	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
13.1	Persentase koperasi aktif	81.36%	81.38%	81.38%	82%	83%	83%	83%
13.2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	1,869	1881	1911	1941	1971	2001	2031
13.3	Jumlah BPR/LKM	72	8	8	8	8	8	8

13.4	Usaha Mikro dan Kecil	99.79%	99.80%	99.80%	99.80%	99.80%	99.80%	99.80%
14	Penanaman Modal							
14.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	637	690	720	760	850	890	3,867
14.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	841,535,650,684	900,000,000	950,000,000	1,000,000,000	1,100,000,000	1,175,000,000	5,966,535,650,684
14.3	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	-	58,464,349,316	50,000,000,000	50,000,000,000	100,000,000,000	75,000,000,000	333,464,346,216
15	Kebudayaan							
15.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	6	6	7	8	9	10	11
15.2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	5	5	5	5	5	5	5
15.3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	15	15	15	16	17	18	18
16	Kepemudaan dan Olahraga							
16.1.	Jumlah organisasi pemuda	105	105	105	105	105	105	105
16.2.	Jumlah organisasi olahraga	133	133	133	133	133	133	133
16.3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	35	35	35	35	35	35	35
16.4.	Jumlah kegiatan olahraga	41	41	41	41	41	41	41

16.5.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	1	1	1	1	1	1	1
16.6.	Lapangan olahraga	157	157	157	157	157	157	157
17	Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri							
17.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	1	1	1	1	1	1	1
17.2.	Kegiatan pembinaan politik daerah	1	1	1	1	1	1	1
18	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
18.1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	7.80	9.19	10.59	11.98	13.37	14.74	14.7
18.2	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	67.5	67.25	79.07	90.77	102.45	114.41	114.4
18.3	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	1:8,33	1:8,33	1:8,33	1:8,33	1:8,34	1;9,09	1;9,09
18.4	Pertumbuhan ekonomi	6,32	7,20	7,26	7,11	7,07	7,03	6,98
18.5	Kemiskinan	-70026	-70923	-71905	-73158	-74105	-75026	-76245
18.6	Penegakan PERDA	13	1	1	1	1	1	18
18.7	Cakupan patroli petugas Satpol PP	10	24	24	24	24	24	24
18.8	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

18.9	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	0.68%	0.67%	0.79%	0.91%	1.02%	1.14%	1.14%
18.10	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	0.0035%	0.0035%	0.0069%	0.0081%	0.0092%	0.0103%	0.010%
18.11	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	Ketahanan Pangan							
19.1	Regulasi ketahanan pangan	Tidak Ada	1	1	1	1	1	1
19.2	Ketersediaan pangan utama	70,126	71,023	72,005	73,258	74,205	75,126	76,345
20	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
20.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	55	55	55	55	55	55	55
20.2	Jumlah LSM	23						
20.3	LPM Berprestasi	0	0	0	0	0	0	0
20.4	PKK aktif	63	63	63	63	63	63	63
20.5	Posyandu aktif	140						
20.6	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	2	2	2	2	2	2	2
21	Statistik							

21.1	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
21.2	Buku "PDRB kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
22	Kearsipan							
22.1	Pengelolaan arsip secara baku	40.54%	54.05%	67.56%	78.38%	89.19%	100.00%	100.00%
23	Komunikasi dan Informatika							
23.1	Jumlah jaringan komunikasi	7	7	7	7	8	8	
23.2	Jumlah surat kabar nasional/lokal	9	9	9	9	10	10	
23.3	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	2	2	2	2	3	3	
23.4	Web site milik pemerintah daerah	1	1	1	1	1	1	
23.5	Pameran/expo	1	1	1	1	1	1	
24	Perpustakaan							
24.1	Jumlah perpustakaan	1-55-105	1-55-105	1-55-115	1-55-120	1-55-120	1-55-120	1-55-120
24.2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	177,325	180,000	186,240	193,560	201,960	201,960	201,960
24.3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	142,975	143,457	148,457	153,557	158,757	164,057	164,057

Fokus Layanan Urusan Pilihan								
1.	Pertanian							
1.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	56.47	56.75	57.04	57.32	57.61	57.90	58.19
1.2.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	741,805.64	756,691.75	771,774.59	787,210.08	802,954.28	819,013.37	835,393.63
1.3.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	399,130.9	407,113.52	415,255.79	423,560.90	432,032.12	440,672.76	449,186.22
1.4.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	92,401.29	94,244.32	96,134.30	98,056.99	100,018.13	102,018.49	104,058.86
1.5.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	100	100	100	100	100	100	100
1.6.	Cakupan bina kelompok petani	37.18	37.92	38.68	39.45	40.24	41.05	41.87
2.	Pariwisata							
2.1.	Kunjungan wisata	24.9	26	28	29.5	31	33	35
2.2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB							
3	Kelautan dan Perikanan							
3.1	Produksi perikanan	23,304.20	24,112.73	24,968.64	25,874.54	26,834.24	27,852.24	28,932.29

3.2	Konsumsi ikan	7,759,554	7,804,532	7,860,899	7,917,209	7,966,561	8,014,496	8,080,130
3.3	Cakupan bina kelompok nelayan	22	18	18	18	18	18	18
3.4	Produksi perikanan kelompok nelayan	5,059.4	8,374.3	8,921.5	9,487.1	10,071.8	10,676.1	11,300.6
4	Perdagangan							
4.1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	416,073.78	624,110.67	936,166.01	1,404,249.02	2,106,373.52	3,159,560.28	4,739,340.43
4.2	Ekspor Bersih Perdagangan	95,767,000	95,767,000	95,767,000	95,771,788,350	95,776,576,939	96,781,365,768	96,829,756,451
4.3	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	8.09	12.35	16,22	19,77	23,04	23,04	23,04
5	Perindustrian							
5.1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	248,351.35	442,192.30	717,735.40	1,220,150.18	2,074,255.31	3,526,234.03	5,994,597.85
5.2	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	4,896,653,382	5,228,385,625.56	5,771,456,504.76	6,168,373,025.15	6,661,842,867.16	7,194,790,296.53	7,770,373,520.25
5.3	Pertumbuhan Industri.	10%	11%	11%	11%	11%	11%	12%
5.4	Cakupan bina kelompok pengrajin	1.42%	14%	14%	14%	14%	14%	14%

ASPEK DAYA SAING DAERAH								
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur								
1.	Penataan Ruang							
1.1	Ketaatan terhadap RTRW	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
1.2	Luas wilayah produktif	67,671	67,671	67,671	67,671	67,671	67,671	67,671
1.3	Luas wilayah industry	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
1.4	Luas wilayah banjir	487.39	487.39	487.39	487.39	487.39	487.39	487.39
1.5	Luas wilayah kekeringan	2,043	2,043	2,043	2,043	2,043	2,043	2,043
1.5	Luas wilayah perkotaan	199.32	199.32	199.32	199.32	199.32	199.32	199.32
2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
2.1	Jumlah bank dan cabang	17	17	17	17	17	17	17
2.2	Jumlah restoran / Rumah Makan	63	63	63	63	63	63	63
2.3	Jumlah penginapan/ hotel	16	16	16	16	16	16	16

3	Lingkungan Hidup							
3.1	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	84.00	86.82	89.64	92.46	95.28	98.10	99.20
Fokus Iklim Berinvestasi								
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	Angka kriminalitas	154	150	145	141	137	134	134
1.2.	Jumlah demo	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Lama proses perijinan							
	SITU	3	3	3	2	2	1	1
	SIUP	3	3	3	2	2	1	1
	TDP	3	3	3	2	2	1	1
	HO	5	5	5	4	4	3	3
	IMB	6	6	6	6	6	5	5
	IUJK	5	3	3	2	1	1	1
	REKLAME	5	3	3	2	2	1	1
	TRAYEK	5	3	3	2	1	1	1
	IZIN USAHA PERIKANAN	5	3	3	2	1	1	1
	TDG	5	3	3	2	2	1	1

	TDI	5	3	3	2	2	1	1
	IUI	5	3	3	2	2	1	1
	IZIN LEMBAGA PENDIDIKAN	5	3	3	3	2	2	2
	IZIN LINGKUNGAN	3	3	3	2	2	2	2
	PENELITIAN	3	3	2	2	1	1	1
	KIOS, LODS DAN PELATARAN	5	3	2	2	1	1	1
Fokus Sumber Daya Manusia								
1.	Ketenagakerjaan							
1.1.	Rasio lulusan S1/S2/S3	754	762	770	778	786	794	802
1.2.	Rasio ketergantungan	55.83	55.46	55.09	54.72	54.35	53.98	53.61